



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menrokis Purba^{1*}, Restu Agusti², Rofika Rofika³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru

*Email: menrokispurba@gmail.com

Keywords

Financial statement presentation, Internal control system, Accessibility of financial reports, Accountability of regional financial management

Article informations

*Received:
2021-08-17
Accepted:
2021-10-30
Available Online:
2021-11-30*

Abstract

This study aims to examine the effect of the presentation of financial statements, internal control systems and accessibility of financial reports on the accountability of regional financial management. The population in this study were 23 opd within the Pematangsiantar city government. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The data were processed using SPSS version 25 and analyzed using multiple linear regression analysis. The dependent variable in this study is the accountability of regional financial management. The independent variables used in this study are the presentation of financial statements, the internal control system and the accessibility of financial statements. The results of this study indicate that the presentation of financial statements affects the accountability of regional financial management, the internal control system affects the accountability of regional financial management, the accessibility of financial reports affects the accountability of regional financial management.

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya organisasi publik pada saat ini menimbulkan tuntutan dari masyarakat untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi. Tuntutan ini tidak terlepas terhadap akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah mulai dari pengaturan, pelaksanaan, organisasi, tanggung jawab, dan pengawasan harus benar-benar dipertanggungjawabkan dan diwakili kepada daerah dan DPRD yang diidentifikasi dengan pencapaian dan kekuarangan sebagai penilaian untuk tahun berikutnya (Hanif et al., 2015).

Untuk mewujudkan akuntabilitas maka pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang menyediakan semua informasi keuangan secara relevan, jujur dan terbuka kepada publik (Mulyana, 2019). Masyarakat sebagai pemilik dana dari pemerintah berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah agar pemerintah dapat berjalan sesuai



dengan koridornya.

Namun kenyataannya masalah akuntabilitas masih sering terjadi pada pemerintah daerah. Beberapa pemerintah daerah masih menunjukkan permasalahan dalam laporan pertanggungjawabannya. Misalnya di Sumatera Utara beberapa pemerintah daerah masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Kota Pematang Siantar, Padang Sidempuan, Medan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Padanglawas, Langkat, Nias Utara, Mandailing Natal, Pakpak Bharat dan Karo. Sedangkan Kabupaten Simalungun, Nias Barat dan Tanjungbalai BPK tidak memberikan pendapat (disclaimer). Khusus Nias Selatan, belum diberikan opini karena baru menyerahkan LKPD pada 12 Juni 2019 (LHPD Sumatera Utara, 2019)

Berdasarkan surat BPK perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2019, Kelebihan pembayaran belanja modal atas kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan belum dipulihkan dengan penyetoran ke kas daerah. Hal ini sebagai bukti bahwa LKPD Kota Pematangsiantar yang sebelumnya mendapatkan opini WTP namun pada tahun 2019 mendapatkan opini WDP karena masih ditemukan catatan kelemahan.

Dari fenomena tersebut dapat kita ketahui bahwa yang terjadi masih adanya kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari pengaturan, pelaksanaan, organisasi, tanggung jawab, dan pengawasan. Sehingga pemerintah daerah harus mengatasi hal tersebut dengan meakukan peningkatan dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas. Faktor pertama dalam penelitian ini yaitu penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas (Nordiawan & Hertianti, 2011). Penyajian laporan keuangan menjadi penyebab akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dimana penyajian laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP Nomor 71 Tahun 2010, 2010). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum.

Penyajian laporan keuangan adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat



bagi pengguna laporan keuangan (PSAK No. 1 (Revisi 2009)., 2015). Penyajian data yang lengkap dalam laporan keuangan akan membuat lugas dan nantinya akan mempertanggungjawabkan (Nordiawan & Hertianti, 2011).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu antara lain penelitian Sande (2013),(Wahida, 2015), dan (Aliyah & Nahar, 2012) menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Sedangkan penelitian (Fadli, 2017) dan (Azizah et al., 2015) menyatakan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Internal. Sesuai dengan undang-undang no. 60 Tahun 2008 di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi sektor publik. Lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian agar dapat meminimalkan risiko yang ada. Pengendalian internal dalam pemerintahan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkecimpung di dunia pemerintahan (Sandria, 2020).

Hasil penelitian (Wulansari, 2014) menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Putri (2018) dan Azizah et al (2015) menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah aksesibilitas laporan keuangan. Sesuai dengan penelitian Wahyuni et al (2014) ketersediaan Ikhtisar Anggaran adalah kemudahan seseorang untuk mendapatkan data tentang laporan keuangan. Kelompok masyarakat sebagai perkumpulan yang menawarkan kepercayaan kepada otoritas publik untuk mengawasi rekening memiliki opsi untuk mendapatkan data keuangan pemerintah untuk menilai otoritas publik. Ketersediaan laporan anggaran merupakan akomodasi bagi seseorang untuk memperoleh data tentang laporan keuangan (Fauziyah & Handayani, 2017).

Akuntabilitas yang efektif bergantung pada masyarakat untuk laporan tanggung jawab dan penemuan yang dapat dibaca dan dirasakan. Dengan akses yang bagus, mudah didapat, mudah dibaca dan lugas mencerminkan keterusterangan pemerintah terdekat dalam

menjalankan pemerintahannya. Sehingga dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah wilayah cenderung disurvei apakah pemerintah provinsi telah berhasil melaksanakan kewajibannya secara tepat atau tidak. Jadi, semakin baik aksesibilitas laporan keuangan, semakin bagus juga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nugroho & Sukhemi (2016), Sande, (2013) dan Wahida (2015) menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Azizah et al (2015) menemukan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam, oleh sebab itu penelitian ini masih menarik untuk dilakukan. Penelitian ini mengembangkan penelitian (Dewi, 2018) yang meneliti pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas dengan menambahkan sistem pengendalian internal. Hal ini didasarkan pada penelitian Haryani & Julita (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern meningkatkan akuntabilitas pemerintah pada Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kota Pematangsiantar. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memiliki kontribusi kepada pemerintah Kota Pematang Siantar.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Otoritas publik harus memiliki pilihan untuk mengatur laporan keuangan sesuai dengan sebagian besar norma pembukuan yang diakui dan memenuhi atribut subjektif dari ringkasan anggaran. penyajian data yang lengkap dalam rangkuman anggaran akan membuat lugas dan nantinya akan mempertanggung jawabkan (Nordawan & Hertianti, 2011). Sande (2013) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki hasil konstruktif yang sangat besar pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Wahida (2015) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki dampak yang besar baik sedikit maupun sementara pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aliyah & Nahar (2012) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penyajian Laporan Keuangan Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar.



Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian orang dalam yang dilaksanakan secara menyeluruh di antara pemerintah pusat dan pemerintah lingkungan. Alasan SPIP adalah untuk memberikan penegasan yang memuaskan terhadap pencapaian kelayakan dan efektivitas dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kualitas pengumuman keuangan yang tidak tergoyahkan, pembelaan sumber daya negara, dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan. Intisari dari Undang-Undang Tidak Resmi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Penerapan pengendalian internal yang baik akan memberikan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal yang baik tentu tidak akan berguna jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkompeten (Santika, 2021). pengendalian internal dicirikan sebagai komunikasi yang dipengaruhi oleh sistem kemajuan SDM dan informasi yang direncanakan untuk membantu hubungan dalam mencapai tujuan eksplisit (Joushan, Shindie Aulia, Syamsul, Muhammad, Kartika, 2015). Kontrol ke dalam adalah pendekatan untuk mengarahkan, menyaring, dan mengukur aset suatu asosiasi, dan mengambil peran penting dalam mencegah dan mengidentifikasi pencurian atau kekeliruan (Asfiryati, 2017).

Alasan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk memberikan data yang berharga secara dinamis dan menunjukkan tanggung jawab unsur-unsur pengumuman atas aset-aset yang bergantung padanya. Data keuangan yang benar dari publik muncul sebagai hasil dari gagasan tanggung jawab publik. Tanggung jawab publik mengharuskan asosiasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti tanggung jawab dan pengawasan. Kumpulan komunitas sebagai afiliasi yang menawarkan kepercayaan untuk membuka spesialis untuk mengawasi akun terbuka memiliki opsi untuk mendapatkan data keuangan pemerintah untuk menilai otoritas publik. (Wulansari, 2014) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal memiliki dampak yang sangat besar baik sebagian maupun sekaligus terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam

demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Mulyana, 2019) Pemerintah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apalah artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. (Sande, 2013) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Wahida, 2015) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun masih ada kelemahan dimana menurut hasil penelitiannya proses penyampaian, penyebarluasan, dan akses masyarakat terhadap laporan keuangan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 23 OPD Pemerintah Kota Pematangsiantar. 23 OPD tersebut terdiri dari 2 sekretariat, 5 badan dan 14 dinas. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan setelah melaksanakan seminar proposal.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 23 OPD pada Kota Pematang Siantar. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria dinas, badan dan kantor. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di kota pematangsiantar sebagai penanggungjawab laporan keuangan daerah.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 46 (empat puluh enam) orang dari 23 (dua puluh tiga) OPD yang masing-masing OPD ada 2 (dua) responden yaitu Kepala Dinas Dan Kepala Bagian Keuangan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 23 dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 46.



Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Definisi operasional variable dapat dilihat pada atabel 2

Tabel 2

Definisi operasional dapat dilihat pada table berikut:

Variabel dan Defenisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
<p>1 Variabel Dependen (Y): Proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD.</p>	<p>1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum 2. Akuntabilitas proses 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan</p>	Likert
<p>2 Variabel Independen (X₁): Penyajian laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (PP No 71 Tahun 2010).</p>	<p>1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (PP No 71 Tahun 2010).</p>	Likert
<p>3 Variabel Independen (X₂): Sistem pengendalian intern adalah Suatu proses yang dilaksanakan oleh komisaris, manajemen, dan pegawai lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) dalam pencapaian tujuan sebagai berikut: 1. Keandalan laporan keuangan. 2. Ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Efektivitas dan efisiensi operasi. (Krismiaji, 2015)</p>	<p>1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan (Krismiaji, 2015).</p>	Likert
<p>4 Variabel Independen (X₃): Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder. (Superdi, 2017)</p>	<p>1. Terbuka di media masa. 2. Mudah di akses. 3. Ketersediaan Informasi. (Superdi, 2017)</p>	Likert

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah instrumen untuk memperoleh data dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden yang ditetapkan sebagai sampel penelitian.

Metode Analisis Data

Strategi penelitian ini menggunakan variabel (bergantung), khususnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan variabel otonom (bebas) Penyajian laporan keuangan, Sistem pengendalian internal dan Aksesibilitas laporan keuangan. Dalam pengujian ini, tiga spekulasi dicoba dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product And Service Solution). Untuk menguji ketiga spekulasi tersebut digunakan model penelitian relaps yang berbeda yang direncanakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

α = Konstanta

X₁ = Penyajian laporan keuangan

X₂ = Sistem pengendalian internal

X₃ = Aksesibilitas laporan keuangan

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran yang memukau memberikan gambaran atau gambaran tentang sesuatu yang dilihat dari ukuran nilai rata-rata (mean), standar deviasi, perubahan, paling penting dan paling tidak. Efek lanjutan dari wawasan yang jelas dapat ditemukan dalam tabel terlampir.

Tabel 3
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	44	3	5	4,4728	0,5309
Sistem Pengendalian Internal (X2)	44	3	5	4,5290	0,5454
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	44	2	5	4,2029	0,7817
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	44	4	5	4,6646	0,4721
<i>Valid n (listwise)</i>	44				

Sumber: Hasil Data Olahan (2021)



Dari Hasil SPSS pada tabel di atas, sangat terlihat bahwa ukuran informasi (*legitimate*) yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu 44 contoh yang didapat dari hasil kuisioner yang disebarakan peneliti pada OPD Kota Pematangsiantar. Dengan demikian, semua data sampel yang diperoleh dapat diolah sebagai data penelitian.

Hasil Uji Validitas

Ghozali, Imam (2016:52-53) menjelaskan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika r hitung $>$ r tabel, maka item-item di dalam kuisiomer telah memenuhi asumsi validitas. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

Variabel	pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	X1.1	0,412	0,291	Valid
	X1.2	0,549	0,291	Valid
	X1.3	0,675	0,291	Valid
	X1.4	0,636	0,291	Valid
	X1.5	0,615	0,291	Valid
	X1.6	0,680	0,291	Valid
	X1.7	0,672	0,291	Valid
	X1.8	0,614	0,291	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X2)	X2.1	0,575	0,291	Valid
	X2.2	0,710	0,291	Valid
	X2.3	0,701	0,291	Valid
	X2.4	0,630	0,291	Valid
	X2.5	0,693	0,291	Valid
	X2.6	0,646	0,291	Valid
	X2.7	0,539	0,291	Valid
	X2.8	0,655	0,291	Valid
	X2.9	0,395	0,291	Valid
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	X3.1	0,911	0,291	Valid
	X3.2	0,819	0,291	Valid
	X3.3	0,820	0,291	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	Y1.1	0,754	0,291	Valid
	Y1.2	0,861	0,291	Valid
	Y1.3	0,676	0,291	Valid
	Y1.4	0,734	0,291	Valid
	Y1.5	0,657	0,291	Valid
	Y1.6	0,760	0,291	Valid
	Y1.7	0,671	0,291	Valid

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa seluruh item pertanyaan di dalam kuisioner penelitian ini telah menunjukkan nilai r hitung $>$ r tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data di dalam penelitian ini telah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan keamanan skala estimasi. Keandalan menggabungkan kekokohan ukuran dan konsistensi ukuran dalam. Ukuran kekokohan adalah kapasitas instrumen untuk tetap stabil atau tidak berdaya terhadap keadaan apa pun. Keamanan tindakan menunjukkan kesopanan ukuran dalam memperkirakan ide. Suatu perjanjian atau suatu variabel dikatakan kuat jika memberikan nilai Cronbach yang tidak signifikan $> 0,06$ (Mudrajad Kuncoro, 2015). Konsekuensi dari uji kualitas tak tergoayahkan instrumen dapat ditemukan di tabel terlampir.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X1)	0,756	0,6	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,790	0,6	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3)	0,809	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	0,849	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 25 (2021)

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa nilai *Cronbach's alpha* dari penyajian laporan keuangan (X1) adalah 0,756, sistem pengendalian internal (X2) adalah 0,790, aksesibilitas laporan keuangan (X3) adalah 0,809 dan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) sebesar 0,849. Semua faktor dalam penelitian ini memiliki kualitas *alfa Cronbach* lebih besar dari 0,6. Dengan demikian, sangat baik dapat dianggap bahwa instrumen polling yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan.

Hasil Uji Normalitas

Uji keteraturan ini berkeinginan untuk memilih penyampaian data yang ada di variabel-variabel yang akan disiapkan dalam penilaian. Data yang bagus dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki sebaran yang teratur. Uji keteraturan dalam uji ini diselesaikan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

Efek samping dari koefisien jaminan dapat ditemukan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

	Unstandardized Residual
N	44
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	0,0365977
Std. Deviation	1,29170069
Most Extreme Differences	
Absolute	0,115
Positive	0,115
Negative	-0,096
Test Statistic	0,115
Asymp. Sig. (2tailed)	,170 ^c

Sumber: Penelitian Terdahulu



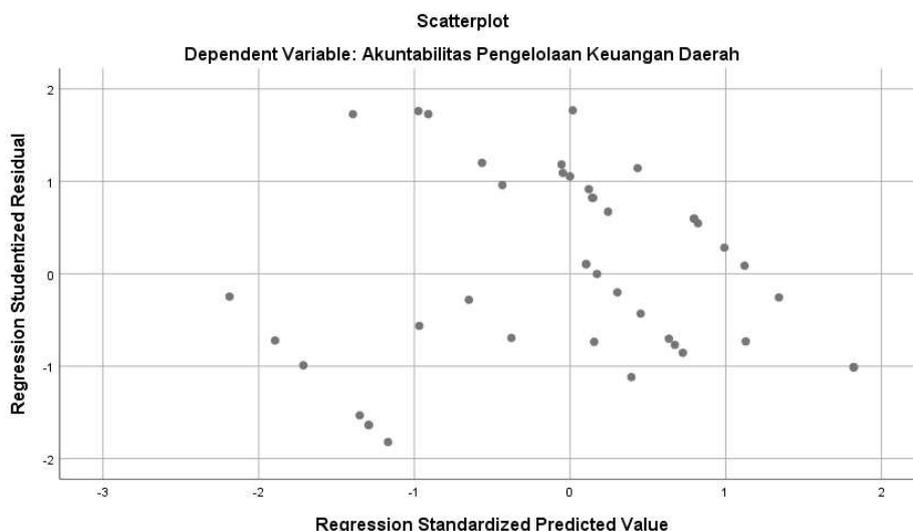
Dilihat dari tabel hasil uji Kolmogorov-Smirnov di atas, cenderung terlihat bahwa Asymp. sig (2-tailed) adalah $0,170 > 0,05$. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai yang tersisa biasanya tersebar karena nilai kepentingan lebih penting daripada $0,05$. Oleh karena itu, efek samping dari penelitian ini diumumkan layak karena informasi yang dibedah telah memenuhi langkah-langkah untuk uji biasa.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk memeriksa apakah model relaps dapatkan hubungan antar variable (bebas). Model relaps yang baik seharusnya tidak memiliki hubungan antara faktor-faktor otonom. Gejala biaya obstruksi yang dinilai adalah bahwa setiap faktor yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai kekuatan $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Dengan demikian, model relaps pada penelitian ini cenderung beralasan telah terbebas dari multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk memeriksa apakah di model relaps terdapat ketidakrataan kontras antara sisa insight yang satu dengan yang lainnya.



Gambar 1
Grafik Scatterplot

Dari gambar grafik scatterplot juga dapat diketahui bahwa titik-titik di dalam grafik menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur. Sehingga, berdasarkan dua uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang

akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,559	3,428		1,038	0,305
Penyajian Laporan Keuangan	0,348	0,096	0,375	3,623	0,001
Sistem Pengendalian Internal	0,297	0,077	0,377	3,838	0,000
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,361	0,126	0,301	2,872	0,006

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 25 (2021)

Dari tabel di atas, dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 3,559 + 0,348X_1 + 0,297X_2 + 0,361X_3 + 0$$

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kapasitas model untuk memperjelas keragaman variabel terikat. Nilainya berkisar dari 0 hingga 1. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kapasitas faktor bebas dalam menjelaskan variasi variabel bergantung sangat terbatas, dan sekali lagi jika R^2 besar, ini menunjukkan kapasitas variable bebas untuk memperjelas variasi variabel lingkungan yang sangat besar. Efek samping dari koefisien jaminan dapat ditemukan pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,839	0,704	0,682	1,33850

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi atau adjusted R^2 dalam penelitian ini adalah sebesar 0,682. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan dalam menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 68,2%, sedangkan sisanya 31,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh yaitu variabel penyajian laporan



keuangan memiliki nilai koefisien regresi beta sebesar 0,375 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Nilai t hitung variabel penyajian laporan keuangan menunjukkan nilai sebesar $3,623 >$ nilai t tabel 2,02108. Sehingga, berdasarkan kriteria hipotesis pertama H1 diterima. Oleh karena itu, keadaan sekarang menunjukkan bahwa seberapa baik penyajian laporan keuangan di suatu kantor akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam organisasi yang bersangkutan.

Hasil pengujian yang menemukan hasil signifikan dikarenakan Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya dan pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sande (2013), Wahida (2015) dan (Aliyah & Nahar, 2012) menemukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sekaligus menolak penentian Fadli (2017) dan Azizah et al (2015) yang menyatakan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh yaitu variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai koefisien regresi beta sebesar 0,377 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai t hitung variabel penyajian laporan keuangan menunjukkan nilai sebesar $3,838 >$ nilai t tabel 2,02108. Sehingga, berdasarkan kriteria hipotesis kedua H2 diterima.

Sehingga, keadaan ini menunjukkan bahwa seberapa baik sistem pengendalian internal dan penerapannya pada suatu instansi maka akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada instansi yang bersangkutan. Pelaksanaan pengendalian internal yang memuaskan akan memberikan kepercayaan pada kualitas atau keandalan laporan keuangan, dan akan memperluas kepastian mitra. Pelaksanaan situasi pengendalian batin yang baik dan benar akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat

diandalkan dan bermanfaat, produksi perlindungan untuk sumber daya negara serta menjamin konsistensi dan konsistensi setiap jabatan dengan undang-undang dan pedoman dan pengakuan penggunaan yang sah dari standar akuntabilitas dan keterusterangan di setiap bidang OPD (Sari, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian (Wulansari, 2014) menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak positif dan besar pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan penelitian Putri (2018) dan Azizah et al (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak secara positif mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini didasarkan pada data yang diperoleh yaitu variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi beta sebesar 0,301 dengan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Nilai t hitung variabel aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan nilai sebesar $2,872 >$ nilai t tabel 2,02108. Sehingga, berdasarkan kriteria hipotesis ketiga H3 diterima. Selanjutnya, keadaan sekarang menunjukkan bahwa seberapa baik ketersediaan laporan keuangan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dengan akses yang baik, mudah diperoleh, mudah dibaca dan mudah dipahami mencerminkan transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Jadi semakin baik aksesibilitas laporan keuangan maka akan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugroho & Sukhemi, (2016) dan Sande, (2013) menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sekaligus menolak penelitian Azizah et al (2015) yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.



SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kota Pematangsiantar. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak mampu memberikan gambaran yang jelas kepada responden dan membantu responden dalam penyesuaian survei. Hal ini karena kesibukan responden, pandemi virus Corona dan keterbatasan wilayah. Segala sesuatu yang tidak dapat diterima oleh responden untuk menjawab jajak pendapat dengan lugas dan meminta beberapa hari. Keterbatasan ini membuat sulit untuk mengetahui apakah responden benar-benar melengkapi survei dengan tepat. Demikian juga, analisis tidak dapat dengan lugas menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh responden mengenai pertanyaan yang diajukan dalam survei.

Kontribusi penelitian pada pemerintah kota pematangsiantar yaitu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah diharapkan memperhatikan penyajian laporan keuangan, memperbaiki sistem pengendalian internal dan meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan kepada publik atau masyarakat melalui media internet atau televisi secara transparan. Selain memiliki kontribusi terhadap pemerintah, penelitian ini juga memiliki kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya akuntansi pemerintahan. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi untuk penelitian tambahan.

REFERENSI

- Aliyah, S., & Nahar, A. (2012). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 137–150. <https://doi.org/10.14710/JAA.8.2.137-150>
- Asfiryati, D. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangandaerhdan Penyajian Laporan Keuangan Terhadapakuntabilitas Pengelolaan Keuangandaerhdengan Sistem Pengendalianintern Sebagai Variabel Intervening(Studi Pada SKPD Kota Dumai)*. 14, 397–426.
- Azizah, N., -, J., & Setiawan, A. R. (2015). Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Research and Applications: Accounting and Management*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.18382/jraam.v1i2.18>
- Dewi, A. C. (2018). *Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Fadli. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus) Universitas Muria Kudus Tahun 2017*.

- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Hanif, R. A., Ratnawati, V., & Saragih, C. A. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2).
- Haryani, S., & Julita, J. (2021). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Studi Pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(1), 78–93. <https://doi.org/10.31258/jc.2.1.78-93>
- Joushan, Shindie Aulia , Syamsul, Muhammad , Kartika, L. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi dan Employee Engagement terhadap Kinerja Karyawan pada PT PLN (Persero) Area Bekasi. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(66), 697–703.
- Mudrajad Kuncoro. (2015). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi* (Cet.2). UPP STIM YKPN.
- Mulyana. (2019). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*. Sinar Manajemen.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011). *No Title* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Nugroho, I., & Sukhemi, S. (2016). Pengaruh Risiko Sistematis Dan Likuiditas Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Akuntansi*, 3(2). <https://doi.org/10.24964/ja.v3i2.52>
- PP NOMOR 71 TAHUN 2010. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- PSAK No. 1 (Revisi 2009). (2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 1 (Revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan. *Ikatan Akuntansi Indonesia*, 01(01), 1–79.
- Putri, M. N. F. (2018). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri). *Director*, 15(40), 6–13.
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 2013 - *Ejournal.Unp.Ac.Id*, 1–20.
- Sandria. (2020). Determinan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud): Dimoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *CURRENT :Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(1), 89–105.
- Santika, N. (2021). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Peran Moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



- Sari, E. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOMFekom*, 4(1), 843–857.
- Sugiyono. (2015). *Metode-Penelitian-Pendidikan-Sugiyono-2015-Bagian-2Pdf-Pdf-Free.Pdf*.
- Wahida. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. *The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods*, 5(1), 113–127.
- Wahyuni, P. S., Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, N., & Herawati. (2014). Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Badung. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Wulansari, A. D. (2014). Efektivitas Penerapan Metode Pembelajaran Student Teams Achievement Divisions Dan Team Assisted Individualization Pada Materi Regresi Linier. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 12(1), 155. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.373>